



REPRESENTASI PEMBANGUNAN DAN MASYARAKAT ADAT DALAM FILM DOKUMENTER PESTA BABI: ANALISIS MODEL PROPAGANDA JOWETT DAN O'DONNELL

Luqman Zainuddin

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi,

Universitas Hasanuddin

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi propaganda dalam film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita serta menjelaskan bagaimana film tersebut membangun persepsi, memengaruhi cara berpikir, dan mengarahkan kecenderungan sikap audiens terhadap isu pembangunan dan masyarakat adat di Papua Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi kualitatif. Data diperoleh melalui observasi terhadap film, dokumentasi adegan, dialog, narasi, dan simbol visual, serta studi pustaka yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan model propaganda Jowett dan O'Donnell yang meliputi aspek shaping perceptions, manipulating cognitions, dan directing behavior. Hasil penelitian menunjukkan bahwa film membentuk persepsi masyarakat adat sebagai kelompok yang terdampak langsung oleh proyek pembangunan, sementara negara dan korporasi direpresentasikan sebagai aktor dominan dalam pemanfaatan wilayah. Film juga memengaruhi cara berpikir audiens melalui penggunaan simbol-simbol seperti hutan adat, sagu, tanah ulayat, dan visual kerusakan lingkungan yang merepresentasikan ancaman terhadap ruang hidup masyarakat adat. Selain itu, film membangun empati, kesadaran kritis, serta perhatian terhadap perlindungan hak-hak masyarakat adat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pesta Babi tidak hanya berfungsi sebagai media dokumentasi dan informasi, tetapi juga sebagai instrumen komunikasi politik yang membentuk pemaknaan publik mengenai pembangunan, lingkungan, dan masyarakat adat di Papua Selatan.

Kata Kunci: propaganda, film dokumenter, komunikasi politik, masyarakat adat, pembangunan.

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia baru-baru ini heboh dengan film dokumenter berjudul “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale. Film berdurasi 96 menit tersebut menyoroti perjuangan masyarakat adat Marind, Yei, Awyu, dan Muyu di Papua Selatan dalam menghadapi proyek strategis nasional (PSN) pemerintah di bidang pangan dan energi. Selain merekam resistensi masyarakat adat terhadap proyek tersebut, film ini juga mengangkat persoalan separatisme serta jejak operasi militer Indonesia selama lebih dari enam dekade yang berkaitan dengan penguasaan wilayah dan pemanfaatan sumber daya alam di Papua (JubiTV, 2026).

Film ini didistribusikan secara independen melalui jaringan akar rumput, pemutaran keliling, festival film, dan platform digital (Insight, 2026). Distribusi dilakukan secara gotong royong oleh kolaborator seperti Watchdoc, Ekspedisi Indonesia Baru, dan media alternatif. Gelombang nonton bareng film juga terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia oleh kelompok masyarakat dari berbagai latar belakang.

Film ini dengan cepat memperoleh animo masyarakat karena mampu membangun keterlibatan emosional audiens berkat narasi yang dibangun dalam film dengan memperlihatkan bagaimana PSN yang diklaim sebagai proyek mulia untuk membawa kemajuan dan kesejahteraan di wilayah Papua Selatan, justru memunculkan keresahan dan perlawanan masyarakat adat yang merasa tidak pernah dimintai pendapat atas terusnya hutan sebagai ruang hidup mereka.

Kemampuan film ini dalam membangun keterlibatan emosional dan memengaruhi cara pandang audiens

menunjukkan bahwa medium ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen komunikasi politik (Mahmudi, 2013). Melalui pemilihan narasi, simbol, visual, serta konstruksi realitas tertentu, film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita dapat membentuk persepsi publik terhadap suatu isu sosial maupun politik. Dalam konteks tersebut, film dapat dipahami sebagai medium yang memiliki potensi propaganda karena kemampuannya menyampaikan pesan, nilai, dan kepentingan tertentu kepada khalayak melalui konstruksi narasi dan representasi audio visual yang efektif (Suryanto & Mariani, 2018).

Harold Lasswell (1927) mendefinisikan propaganda sebagai upaya mengendalikan opini melalui penggunaan simbol-simbol yang bermakna. Propaganda tidak selalu hadir dalam bentuk pesan politik yang eksplisit, tetapi juga dapat disampaikan melalui representasi visual, cerita, maupun narasi yang membangun cara pandang tertentu terhadap suatu peristiwa. Dengan demikian, film dokumenter dapat menjadi salah satu medium propaganda ketika narasi yang disajikan diarahkan untuk membentuk interpretasi dan sikap audiens terhadap isu yang diangkat.

Selain Harold Lasswell, Ralph D. Casey (1944) menawarkan perspektif yang berbeda mengenai propaganda. Casey memandang propaganda sebagai upaya untuk membentuk sikap dan opini publik yang berkaitan dengan suatu doktrin, gagasan, atau program tertentu. Namun, berbeda dari pandangan yang menekankan unsur persuasi melalui simbol, Casey menyoroti peran lembaga komunikasi dalam menyebarkan fakta secara sadar dengan tetap menjunjung objektivitas dan kejujuran. Dengan demikian, propaganda tidak selalu dipahami sebagai bentuk

manipulasi informasi, tetapi juga dapat dipandang sebagai usaha komunikasi yang bertujuan membangun dukungan terhadap suatu gagasan melalui penyampaian informasi yang dianggap faktual dan objektif.

Sementara itu, Garth Jowett dan Victoria O'Donnell (2018) memandang propaganda sebagai suatu proses komunikasi yang dilakukan secara sengaja dan sistematis untuk membentuk persepsi, memanipulasi kognisi, serta mengarahkan perilaku khalayak agar menghasilkan respons yang sesuai dengan tujuan komunikator. Dalam perspektif ini, propaganda tidak semata-mata dipahami sebagai penyebaran informasi yang menyesatkan, tetapi sebagai upaya strategis untuk membangun cara pandang tertentu terhadap suatu realitas sosial melalui pemilihan pesan, simbol, narasi, dan representasi yang terencana.

Menurut Jowett dan O'Donnell, propaganda bekerja melalui tiga dimensi utama, yaitu *shaping perceptions* (membentuk persepsi), *manipulating cognitions* (memengaruhi cara berpikir), dan *directing behavior* (mengarahkan perilaku). Melalui proses tersebut, propaganda berupaya membangun pemaknaan tertentu terhadap suatu isu sehingga audiens tidak hanya memahami realitas dengan cara tertentu, tetapi juga terdorong untuk mengambil sikap atau tindakan yang sejalan dengan tujuan propagandis.

Dalam konteks film dokumenter, propaganda dapat hadir melalui pemilihan sudut pandang, narasumber, visualisasi, simbol, maupun struktur narasi yang digunakan untuk merepresentasikan suatu peristiwa. Oleh karena itu, film dokumenter tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga dapat menjadi sarana pembentukan persepsi publik terhadap isu sosial, politik, dan budaya tertentu.

Dalam kaitannya dengan film dokumenter *Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita*, perspektif Jowett dan O'Donnell membantu menjelaskan bagaimana film membangun persepsi audiens mengenai relasi antara pembangunan, negara, korporasi, dan masyarakat adat di Papua Selatan. Melalui kesaksian masyarakat adat, dokumentasi perubahan lingkungan, serta penonjolan dampak sosial dan budaya yang ditimbulkan oleh proyek pembangunan, film berupaya membentuk pemaknaan tertentu mengenai konsekuensi pembangunan terhadap ruang hidup masyarakat adat. Dengan demikian, film ini dapat dipahami sebagai praktik komunikasi politik yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga berupaya memengaruhi cara berpikir dan sikap audiens terhadap isu pembangunan dan keadilan sosial di Papua.

Kajian mengenai propaganda dalam film telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Salah satu penelitian yang relevan adalah penelitian Mahmudi (2013) yang menganalisis teknik propaganda anti-Iran dalam film *Argo*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa film tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai instrumen komunikasi politik yang mampu membentuk persepsi publik melalui konstruksi narasi, penempatan subjek-objek, serta penggunaan teknik propaganda seperti *card stacking* yang menampilkan sisi terbaik pihak Amerika dan sisi terburuk pihak Iran. Penelitian tersebut menegaskan bahwa film dapat menjadi sarana untuk membangun legitimasi terhadap sudut pandang tertentu melalui representasi yang tidak sepenuhnya netral.

Penelitian lain dilakukan oleh Mirnawati, Ali, dan Zalpa (2019) yang membandingkan film *Pengkhianatan G30S/PKI* dan *Jagal* sebagai media propaganda politik. Penelitian tersebut

menemukan bahwa kedua film, meskipun mengangkat peristiwa sejarah yang sama, menghadirkan konstruksi realitas yang berbeda sesuai dengan kepentingan politik pada zamannya. *Pengkhianatan G30S/PKI* membentuk persepsi publik bahwa PKI merupakan pelaku utama tragedi 1965, sedangkan *Jagal* membangun persepsi alternatif yang menempatkan PKI sebagai korban kekerasan politik.

Ada juga penelitian dari Julian Aditya Karnajaya dan Faris Budiman Annas (2023) berjudul *Analisa Naratif Propaganda Film Dokumenter Sexy Killers*. *Sexy Killers* adalah sebuah film dokumenter yang berisikan mengenai konflik tambang batubara dan PLTU yang terjadi di masyarakat dan bagaimana konflik yang terjadi dalam film ini dapat menggiring opini, memanipulasi emosi dan menggagalkan dukungan kepada penontonnya.

Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa film memiliki kemampuan untuk membentuk opini publik melalui pemilihan narasi, visualisasi, dan representasi aktor sosial tertentu. Namun, sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada film fiksi atau film yang mengangkat peristiwa sejarah yang telah lama terjadi serta lebih menitikberatkan pada identifikasi teknik propaganda yang digunakan.

Adapun penelitian ini memiliki kebaruan pada objek, konteks, dan perspektif analisis yang digunakan. Berbeda dengan penelitian Mahmudi (2013) yang mengkaji propaganda dalam *Argo* serta penelitian Mirnawati dkk. (2019) yang menganalisis propaganda politik dalam *Pengkhianatan G30S/PKI dan Jagal*, penelitian ini berfokus pada film dokumenter kontemporer *Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita* yang mengangkat isu pembangunan, masyarakat adat, dan konflik sumber daya alam di Papua Selatan.

Selain itu, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi keberadaan unsur propaganda dalam film, tetapi juga menganalisis bagaimana film dokumenter sebagai media komunikasi politik membangun konstruksi realitas mengenai proyek pembangunan dan relasi kuasa antara negara, korporasi, serta masyarakat adat. Dengan menggunakan model propaganda Jowett dan O'Donnell, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana narasi, simbol, dan representasi visual dalam film digunakan untuk membentuk persepsi, memengaruhi kognisi, dan mengarahkan kecenderungan sikap audiens terhadap isu pembangunan di Papua. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian propaganda film dari sekadar identifikasi teknik propaganda menuju analisis proses komunikasi yang membentuk pemaknaan publik terhadap isu pembangunan, lingkungan, dan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana propaganda direpresentasikan dalam film dokumenter *Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita* melalui proses pembentukan persepsi, pengaruh terhadap cara berpikir, dan pembentukan kecenderungan sikap audiens berdasarkan model propaganda Jowett dan O'Donnell. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman mengenai penggunaan film dokumenter sebagai media komunikasi yang mampu membentuk opini dan persepsi publik terhadap isu-isu sosial dan politik yang diangkat dalam film.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*). Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana propaganda direpresentasikan dalam film dokumenter *Pesta Babi:*

Kolonialisme di Zaman Kita melalui narasi, simbol, visual, dan konstruksi realitas yang ditampilkan.

Objek penelitian ini adalah film dokumenter *Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita* karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale. Unit analisis dalam penelitian meliputi adegan, dialog, narasi, simbol visual, serta representasi aktor-aktor sosial yang muncul dalam film.

Data penelitian diperoleh melalui observasi terhadap film, dokumentasi adegan dan dialog yang relevan dengan tema penelitian, serta studi pustaka yang mencakup literatur mengenai propaganda, komunikasi politik, film dokumenter, dan model propaganda Jowett dan O'Donnell.

Analisis data dilakukan dengan mengacu pada model propaganda Jowett dan O'Donnell yang mendefinisikan propaganda sebagai upaya komunikasi yang dilakukan secara sengaja dan sistematis untuk membentuk persepsi (*shaping perceptions*), memengaruhi cara berpikir (*manipulating cognitions*), serta mengarahkan perilaku (*directing behavior*) khalayak sesuai dengan tujuan komunikator. Model ini digunakan untuk memahami bagaimana film dokumenter membangun pemaknaan tertentu terhadap isu pembangunan, lingkungan, dan masyarakat adat melalui penyusunan narasi, penggunaan simbol, pemilihan narasumber, serta representasi visual yang ditampilkan.

Berdasarkan kerangka tersebut, analisis difokuskan pada tiga aspek utama. Pertama, *shaping perceptions*, yaitu bagaimana film membentuk persepsi audiens mengenai pembangunan, masyarakat adat, negara, dan korporasi di Papua Selatan melalui narasi, visual, dan representasi yang ditampilkan. Kedua, *manipulating cognitions*, yaitu bagaimana film memengaruhi cara berpikir audiens melalui pemilihan fakta, penyusunan argumentasi, penggunaan simbol, serta

dominasi perspektif tertentu dalam penyampaian cerita. Ketiga, *directing behavior*, yaitu bagaimana film membangun kecenderungan sikap, empati, maupun respons tertentu terhadap isu pembangunan dan dampaknya terhadap masyarakat adat.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif-interpretatif untuk memahami bagaimana film dokumenter berfungsi sebagai media komunikasi politik yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk persepsi, memengaruhi pemahaman, dan mengarahkan pemaknaan audiens terhadap relasi antara pembangunan, negara, korporasi, dan masyarakat adat di Papua Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembentukan Persepsi

Berdasarkan pemikiran Jowett dan O'Donnell, propaganda bekerja melalui proses *shaping perceptions* atau pembentukan persepsi terhadap suatu realitas sosial. Dalam film *Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita*, proses tersebut terlihat melalui cara film merepresentasikan pembangunan, masyarakat adat, negara, dan korporasi dalam struktur narasi yang dibangun.

1. Masyarakat Adat

Representasi masyarakat adat dibangun melalui dominasi kesaksian tokoh-tokoh adat yang muncul sejak awal film. Terdapat lima tokoh masyarakat adat yang menjadi narasumber utama, yakni Yasinta Moiwend dari Suku Marind di distrik Ilwayab Merauke; Natalis Buer dari Suku Marind di Distrik Tanah Miring, Merauke; Vincent Kwipalo dari Suku Yei di Distrik Jagebob, Merauke; Franky Woro dari Suku Awyu di Distrik Fofi, Kabupaten Bofendigol; dan terakhir, Wilem Kimko dari Suku Muyu di Kabupaten Bofendigol. Melalui pengalaman dan pandangan mereka, film menampilkan masyarakat adat sebagai

pemilik ruang hidup yang menghadapi perubahan sosial, budaya, dan lingkungan akibat masuknya proyek pembangunan berskala besar. Mereka mendapatkan porsi menyampaikan pengalaman dan pendapat mereka terkait proyek strategis nasional di wilayah mereka.

Narator terlebih dahulu menggambarkan persoalan yang tengah dihadapi oleh kelima tokoh dengan suku di distrik masing-masing sebelum memberi mereka langsung kesempatan untuk berbicara. Penjelasan dimulai dari Yasinta Moiwend

"Yasinta dari distrik Iluwayat Merauke sudah menjadi korban. Hutan dan rawa sebagai sumber pangan dan ekonomi telah dihancurkan. Jalan sepanjang 135-kilometer sudah dibuat dengan tanah di kiri dan kanannya akan dicetak 1 juta hektare sawah," (menit 08:10).

Selain informasi narator, pada bagian ini, film juga menampilkan video amatir yang diambil oleh warga setempat yang memperlihatkan deretan personel TNI yang disebut menjaga proyek pangan dan energi di wilayah mereka.

"Salib sudah digeser, masih datang juga mereka (TNI) dengan senjatanya ini," (menit 08:45).

Selanjutnya, Natalis Buer, petani milenial yang terdampak program cetak sawah pemerintah. Natalis merasa ditelantarkan pemerintah. Sebab setelah hutannya diubah menjadi sawah, sebagian sawah itu malah tidak tergarap. Warga Papua asli seperti Natalis tidak punya modal untuk benih, pupuk, biaya perawatan hingga ongkos panen.

Tokoh ketiga adalah Vincen Kwipalo. Vincen dan warga di Distrik Jegebob dinarasikan sebagai korban yang terdampak proyek pangan pemerintah. Hutan adat mereka sudah dihancurkan untuk perkebunan tebu dan bioetanol.

"Tanah mereka juga diincar untuk markas militer, pasukan yang akan menjaga proyek pangan dan energi ini," (menit 09:50).

Orang keempat adalah Franky Woro. Wilayah hutan adat Franky dan orang-orang Suku Awyu tengah terancam perluasan perkebunan sawit untuk campuran biodisel atau B50. Mereka merupakan pelopor gerakan palang adat dan salib merah.

"Tanah milik somu sobu subang (wujud ilahi tertinggi), bahwa tanah ini diciptakan oleh Tuhan, dan memberikan warisan kepada kami. Kami ini hanya hak jaga," (menit 11:04).

Tokoh adat terakhir adalah Wilem Kimko. Wilem dan Suku Muyu belum terdampak proyek strategis nasional karena berada di garis belakang. Kendati begitu, mereka bersiap menghadapi segala kemungkinan terburuk.

Narator kemudian menutup pengenalan lima tokoh tersebut dengan memberi informasi sejarah terkait kepunahan sejumlah peradaban, seperti Neanderthal di Eropa, Aztek di Amerika, dan Aborigin di Australia, sembari menegaskan bahwa film ini menceritakan kepunahan sebuah bangsa dan peradaban terjadi di masa ini.

2. Negara dan Korporasi

Di sisi lain, negara dan korporasi direpresentasikan sebagai aktor yang memiliki posisi dominan dalam proses pembangunan. Kehadiran mereka ditunjukkan melalui berbagai data, kebijakan, dan informasi mengenai proyek strategis nasional di bidang pangan dan energi yang dikembangkan di Papua Selatan. Representasi tersebut menempatkan negara dan korporasi sebagai pihak yang memiliki kemampuan untuk menentukan arah perubahan wilayah, sementara masyarakat adat lebih banyak digambarkan sebagai pihak yang

menerima konsekuensi dari kebijakan tersebut.

Penulis memberikan detail kemunculan narasi Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintah dan korporasi dalam film dokumenter Pesta Babi dalam tabel berikut ini:

Menit	Narasi
06:37	Pemerintah membuka lahan 2,5 juta hektare hutan untuk sawit, tebu, padi dan peternakan untuk lumbung pangan dan energi yang jadi ambisi 3 presiden
15:45	Ada intimidasi aparat negara agar masyarakat adat melepas tanah ke perusahaan sawit dan berhenti memasang palang adat dan salib merah
21:13	Jhonlin Group, kontraktor pemerintah yang mendatangkan 2.000 alat berat dengan misi membuka hutan dan rawa untuk jalan sepanjang 135 kilometer
26:30	Kementerian Pertahanan dilibatkan karena PSN dianggap operasi militer selain perang
31:28	Operasi militer Pemerintah Indonesia di Papua melalui Trikora
46:00	Program cetak sawah
54:20	Kegagalan program lumbung pangan yang dijalankan pemerintahan Presiden Soeharto, SBY, dan Jokowi
01:09:00	Kemunculan korporasi mitra pemerintah serta individu-individu berpengaruh pada PSN

3. Pembangunan

Film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita membangun representasi tertentu mengenai pembangunan. Melalui penggabungan data historis, kesaksian masyarakat adat, dokumentasi lapangan, dan informasi mengenai kebijakan pemerintah, pembangunan tidak direpresentasikan semata-mata sebagai simbol kemajuan dan kesejahteraan. Sebaliknya, film menghadirkan pembangunan sebagai arena yang sarat dengan konflik kepentingan serta berpotensi menimbulkan dampak sosial, budaya, dan ekologis bagi masyarakat lokal.

Dengan demikian, film membangun persepsi bahwa pembangunan merupakan proses yang tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga memunculkan berbagai konsekuensi yang perlu dipertimbangkan secara kritis.

Melalui representasi tersebut, Pesta Babi tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi peristiwa, tetapi juga sebagai saluran yang membentuk cara pandang audiens terhadap relasi antara pembangunan, kekuasaan, dan masyarakat adat di Papua Selatan. Representasi yang dibangun kemudian diperkuat melalui penggunaan berbagai simbol visual yang menjadi sarana utama dalam menyampaikan makna sosial dan politik kepada khalayak.

B. Manipulating Cognitions

Menurut Jowett & O'Donnell, propaganda tidak berhenti pada pembentukan persepsi tetapi juga memengaruhi cara berpikir audiens. Secara garis besar, ada empat poin yang dianggap penulis mampu mempengaruhi penonton terhadap cara pandang mereka terhadap kondisi masyarakat di Papua Selatan.

1. Hutan Adat sebagai Simbol Ruang Hidup

Masyarakat adat dalam dokumenter ini tidak menganggap hutan sekadar sebagai tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon atau tumbuhan yang tumbuh di atas tanah yang luas (KBBI, 2026). Lebih dari itu, hutan merupakan sumber penghidupan, identitas budaya, serta bagian dari hubungan spiritual masyarakat adat dengan alam. Dalam film, fungsi dan kedudukan hutan dijelaskan oleh narator sebagai berikut:

"Hutan ini adalah supermarket bagi Suku Awyu juga lumbung pangan, atau bank untuk menyimpan deposito kekayaan alam. Hutan juga tempat yang penuh dengan sejarah suku, situs budaya, dan tempat sakral. Inilah yang mereka

pertahankan dari incaran pemerintah dan perusahaan, untuk semua alasan ini mereka menancapkan ribuan salib merah" (menit 15:20).

2. Sagu sebagai Simbol Identitas dan Kedaulatan Pangan

Sagu ditampilkan sebagai simbol identitas budaya dan kedaulatan pangan masyarakat adat. Dalam film, sagu tidak sekadar dimaknai sebagai bahan pangan, tetapi juga sebagai representasi hubungan historis masyarakat dengan wilayahnya. Kehadiran proyek pangan skala besar kemudian dikontraskan dengan sistem pangan tradisional yang selama ini menopang kehidupan masyarakat adat.

Di dalam film dijelaskan bahwa sagu bukan semata tentang pangan. Bagi orang Awyu dan Marind, sagu adalah kerabat, sosok orang tua, nenek moyang, yang harus dijaga dan dilindungi.

"(Sagu) Itu orang tua kami, nenek moyang kami, yang mengorbankan dirinya menjadi pohon sagu untuk kebutuhan hidup kami. Kami diingatkan oleh leluhur, sagu itu tidak boleh digusur dan tidak boleh diganggu dengan cara apapun, dalam rangka kepentingan apapun, kamu harus bela bahkan jika sampai nyawa harus jadi taruhan demi keselamatan sagu di atas tanah ini," (menit 52:00).

3. Tanah Ulayat sebagai Simbol Hak Kolektif

Tanah ulayat juga menjadi simbol penting yang terus muncul dalam narasi film. Tanah tidak sekadar direpresentasikan sebagai komoditas ekonomi semata, melainkan sebagai hak kolektif yang melekat pada identitas dan keberadaan masyarakat adat. Oleh karena itu, konflik lahan yang ditampilkan dalam film bukan sekadar persoalan kepemilikan tanah, melainkan menyangkut keberlangsungan komunitas dan hak-hak adat.

Dalam film, pesta babi direpresentasikan sebagai tradisi budaya yang memiliki makna sosial, ekonomi, dan spiritual bagi masyarakat adat Papua. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana perayaan atau ritual adat, tetapi juga menjadi simbol kuat hubungan masyarakat dengan tanah, hutan, dan sumber daya alam yang menopang kehidupan mereka. Keberlangsungan pesta babi bergantung pada keberadaan ruang hidup yang terjaga, sehingga ancaman terhadap tanah ulayat pada dasarnya juga dipandang sebagai ancaman terhadap keberlanjutan tradisi dan identitas budaya masyarakat adat. Melalui penggambaran tersebut, film menegaskan bahwa tanah ulayat bukan sekadar aset ekonomi, melainkan fondasi bagi keberlangsungan kehidupan sosial, budaya, dan spiritual komunitas adat di Papua.

"Jangan sampai orang luar datang dan bertanya, kamu punya sejarah dan asal usul dari mana, jangan sampai anak-anak saya tidak bisa menunjukkan adatnya, lalu orang luar itu datang dan bilang, kamu keluar dari sini," Wilem Kimko (menit 01:28:00).

Makanya, kehilangan ruang hidup bagi Suku Muyu sama saja dengan kehilangan peradaban. Muyu menjadikan pesta babi sebagai persiapan diri dan konsolidasi dengan anggota suku dan klan menghadapi ancaman proyek negara seperti yang sedang dan telah dialami suku-suku lain yang wilayahnya bersinggungan dengan PSN.

4. Visual Kerusakan Lingkungan sebagai Simbol Ancaman

Berbagai visual kerusakan lingkungan, perubahan lanskap hutan, serta ekspansi kawasan industri berfungsi sebagai simbol ancaman terhadap kehidupan masyarakat. Visual tersebut diperlihatkan sejak awal, seperti pada 10 menit pertama yang

memperlihatkan hamparan tanah kosong hasil pembukaan lahan hutan besar-besaran dengan narator menyebutkan:

"...di bagian Indonesia, sedang terjadi proyek pemusnahan hutan terbesar di dunia. Pemerintah Indonesia sudah membuka 2,5 juta hektare hutan untuk sawit, tebu, padi dan peternakan," (menit 06:20)

Simbol-simbol tersebut digunakan untuk membangun kesan bahwa proyek pembangunan membawa konsekuensi yang jauh lebih kompleks daripada sekadar pertumbuhan ekonomi.

Visualisasi pembukaan lahan dan perubahan bentang alam diposisikan sebagai ancaman terhadap keberlangsungan hidup komunitas lokal. Secara detail, visualisasi pembukaan lahan penulis bagi dalam timestamp dalam tabel berikut.

Menit	Keterangan
06:23	Pembukaan lahan dan penebangan pohon dengan sudut pengambilan gambar dari udara
08:35	Pembuatan jalan sepanjang 135-kilometer dengan sisi kanan-kiri
21:40	jalan hutan yang sudah dibabat
25:32	Eskavator bergerak di atas rawa dan pepohonan yang sudah tumbang. Burung Kasuari tampak melintas di depan eskavator
36:21	Lahan terbuka akibat pembabatan hutan di sejumlah wilayah di Papua untuk sejumlah kepentingan, seperti tambang hingga penanaman pohon industri
37:24	Visual sebuah pohon berdiri di tengah hamparan tanah bekas hutan dengan pemandangan onggokan batang-batang pohon
37:40	Alat berat membersihkan sisa-sisa pohon akibat pembukaan lahan
38:56	Alat berat beroperasi di tengah hutan merubuhkan pohon-pohon satu demi satu
53:44	Empat alat berat melakukan pembukaan lahan dengan menumbangkan pepohonan

57:09	Hamparan lahan perkebunan ubi bekas pembukaan lahan hutan seluas 600 hektare
01:07:02	Alat berat menumbangkan pohon satu per satu

C. Directing Behavior

Aspek ketiga dalam model propaganda Jowett dan O'Donnell adalah directing behavior, yaitu upaya mengarahkan kecenderungan sikap dan respons audiens terhadap suatu isu.

1. Pembangunan Empati

Film Pesta Babi berupaya membangun empati audiens terhadap masyarakat adat melalui dominasi kesaksian tokoh-tokoh adat yang menceritakan pengalaman mereka secara langsung. Berbeda dengan penyampaian data statistik atau informasi kebijakan yang bersifat abstrak, film menghadirkan pengalaman personal mengenai kehilangan hutan, perubahan lingkungan, serta kekhawatiran terhadap masa depan komunitas mereka. Strategi tersebut membuat persoalan pembangunan tidak lagi dipahami sebagai isu kebijakan semata, tetapi sebagai persoalan yang menyentuh kehidupan manusia secara langsung. Salah satu kekhawatiran itu terlihat dalam pernyataan warga ini:

"Kami tidak mau melepas hutan, di dalam hutan ada obat tradisional, di dalam hutan ada sayur yang tumbuh sendiri, kita ini mau kemana kalau itu sudah digusur, habis, kita jadi penonton, jangan sampai kita ini duduk minta di jalan, jadi kita tidak mau seperti itu. Makanaya tanah itu tidak mau kita lepas," (menit 43:23).

Empati juga dibangun melalui visualisasi kehidupan sehari-hari masyarakat adat, seperti aktivitas mencari makan di hutan, pemanfaatan sagu sebagai sumber pangan, hingga penjelasan mengenai hubungan spiritual mereka dengan tanah dan hutan. Termasuk mengangkat kekecewaan warga terhadap pemerintah yang

terkesan tidak mendengar suara masyarakat, seperti dalam pernyataan masyarakat ini:

"Apakah lebih baik kita tidak usah ada atau bagaimana, pisahkan dari negara ini? Pak Danyon (saya sampaikan) lebih baik saya mengungsi ke Papua Nugini, kalau (negara) tidak bisa menghargai kami, lebih baik saya pindah dari sini. 17 Agustus ini saya tidak kasih naik bendera. Kita Ini merasa percuma kita hidup di bawah naungan Merah Putih, yang tidak lindungi kami, tidak anggap kami sebagai rakyatnya, (padahal) kami menghargai lambang negara itu," (menit 42:02)

Dengan menghadirkan pengalaman tersebut secara personal dan emosional, film berupaya menempatkan audiens pada posisi masyarakat adat sehingga mereka dapat memahami konsekuensi pembangunan dari perspektif kelompok yang terdampak.

2. Pembangunan Kesadaran Kritis

Selain membangun empati, film juga berupaya mengembangkan kesadaran kritis audiens terhadap wacana pembangunan yang selama ini dominan dalam ruang publik. Narasi pembangunan yang umumnya dikaitkan dengan kemajuan ekonomi, ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan dipertemukan dengan berbagai informasi mengenai konflik lahan, kerusakan lingkungan, dan perubahan sosial yang dialami masyarakat adat.

"Marga Kwipalo dari suku Yei terus mendapat teror dan intimidasi untuk melepas tanah mereka yang dihargai RP300 ribu perhektar," (menit 43:20).

Melalui penyajian data historis, dokumentasi lapangan, serta kesaksian masyarakat lokal, film mendorong audiens untuk melihat pembangunan sebagai proses yang memiliki berbagai

konsekuensi sosial, budaya, dan ekologis. Dengan demikian, film tidak mengajak audiens untuk menerima suatu pandangan secara pasif, tetapi mendorong mereka untuk mempertanyakan serta mengevaluasi kembali berbagai klaim yang selama ini melekat pada proyek-proyek pembangunan berskala besar.

3. Dukungan Terhadap Masyarakat Adat

Aspek lain yang terlihat dalam film adalah upaya membangun dukungan moral terhadap perlindungan hak-hak masyarakat adat. Hal ini tampak dari penonjolan berbagai bentuk perjuangan yang dilakukan masyarakat adat untuk mempertahankan tanah ulayat, hutan, dan ruang hidup mereka. Film memperlihatkan bagaimana masyarakat adat tidak hanya diposisikan sebagai korban, tetapi juga sebagai aktor yang berupaya mempertahankan hak-haknya melalui berbagai bentuk perlawanan sosial dan hukum.

Upaya perlawanan tersebut diperlihatkan di akhir film, di mana berbagai komunitas adat dibantu Gereja melakukan penolakan terhadap perusahaan yang ingin masuk ke wilayah mereka.

"Orang kirim eskavator, orang kirim tentara, orang kirim polisi, pukul kami, kami bukan pencuri, kami tidak pernah mencuri orang pu barang. Kami tidak pernah menangis ke orang lain, kami menangis kepadamu, Tuhan kami lemah. Orang lahin ke wilayah kami untu kasih habis kami," (menit 01:20:55).

Visualisasi perlawanan masyarakat adat juga dilakukan dengan simbolisasi salib merah yang ditanam di tanah dan hutan adat, dusun sagu, dan tempat yang disakralkan. Salib tersebut bukan semata tentang agama, tapi untuk mencegah negara dan perusahaan memasuki hutan adat mereka.

"Kami percaya, kalau memang kami sudah tidak mampu menyelesaikan persoalan ini, berarti kami akan meminta bantuan nenek moyang dan tuhan. Atribut perang orang Awiyu (yang digambar di salib merah) ini tujuannya kami larang dengan sangat keras, siapapun yang melanggar batas, mengganggu keselamatan hak tanah adat kami, kami siap melakukan perang," (menit 03:15).

Film juga memperlihatkan bagaimana perwakilan masyarakat adat menempuh jalur hukum dengan menggugat izin kelayakan lingkungan hidup rencana pembangunan jalan akses sepanjang 135 kilometer, yang dikeluarkan Bupati Merauke, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura.

"Kami mengajukan gugatan ini karena kami masih berduka, kami kehilangan tanah, kehilangan ibu, kehilangan tempat kami mencari makan. Kami lahir menginjak tanah ini, tapi kini mau mencari makan susah karena hutan dan kayu sudah dibongkar. Perusahaan masuk tanpa izin seperti pencuri langsung bongkar hutan dengan ekskavator. Kami sudah buat palang mereka tidak tanggap. Kami mau bersuara atau tegur dorang, tapi kami panik karena TNI yang kerja saat itu dan mereka bersenjata," kata Sinta Gebze, perempuan Malind yang turut menjadi penggugat, (Greenpeace, 2026).

Melalui representasi tersebut, film berupaya mengarahkan audiens untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap persoalan masyarakat adat serta pentingnya mempertimbangkan hak-hak mereka dalam proses pembangunan. Dalam konteks ini, film tidak secara langsung menginstruksikan tindakan tertentu kepada penonton, tetapi berupaya membangun kecenderungan sikap yang lebih simpatik terhadap perjuangan masyarakat adat dalam mempertahankan ruang hidupnya.

D. Film sebagai Media Komunikasi Politik

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pesta Babi tidak hanya berfungsi sebagai film dokumenter, tetapi juga sebagai media komunikasi politik. Film ini menjadi kontra wacana atas narasi pembangunan yang selama ini digaungkan pemerintah dengan narasi masyarakat adat yang berupaya mempertahankan ruang hidupnya.

Sebagai media komunikasi politik, film berfungsi membangun opini publik melalui penyajian informasi yang disusun secara sistematis (Susilawati dkk, 2020). Narasi yang dibangun tidak sekadar menjelaskan kondisi di Papua Selatan, tetapi juga mengarahkan audiens untuk melihat pembangunan dari sudut pandang kelompok yang terdampak. Dengan demikian, film menjadi sarana untuk memperluas kesadaran publik mengenai isu-isu yang sebelumnya kurang mendapatkan perhatian dalam ruang publik nasional.

Selain itu, film ini berfungsi sebagai media advokasi bagi masyarakat adat. Melalui dokumentasi pengalaman, kesaksian, dan perlawanan komunitas lokal, film memberikan ruang bagi kelompok yang selama ini relatif kurang terwakili dalam pemberitaan arus utama. Dalam konteks ini, film berperan sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat adat Papua dan publik yang lebih luas.

E. Produk Budaya Populer dan Instrumen Politik

Temuan penelitian menunjukkan bahwa film dokumenter tidak dapat dipahami semata-mata sebagai media penyampaian informasi. Film juga merupakan produk budaya populer yang memiliki kemampuan membentuk makna sosial dan politik melalui representasi, narasi, dan simbol yang digunakan (Nurhidayah, 2017).

Dalam konteks Pesta Babi, film berfungsi sebagai instrumen politik karena menghadirkan cara pandang tertentu mengenai pembangunan, lingkungan, dan masyarakat adat. Melalui strategi representasi yang digunakan, film tidak hanya mendokumentasikan realitas, tetapi juga mengonstruksi pemaknaan tertentu terhadap realitas tersebut. Dengan kata lain, film menjadi arena produksi makna yang dapat memengaruhi cara publik memahami suatu isu.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa film Pesta Babi bekerja sebagai media komunikasi yang secara sistematis membentuk persepsi, memengaruhi cara berpikir, dan membangun kecenderungan sikap audiens terhadap isu pembangunan dan masyarakat adat. Temuan tersebut sejalan dengan model propaganda Jowett dan O'Donnell yang memandang propaganda sebagai upaya komunikasi yang dilakukan secara sadar untuk membentuk persepsi, memanipulasi kognisi, dan mengarahkan perilaku khalayak. Dalam konteks ini, film dokumenter tidak hanya menjadi produk budaya populer, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen komunikasi politik yang berperan dalam produksi dan penyebaran makna sosial mengenai pembangunan, lingkungan, dan hak-hak masyarakat adat.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita merepresentasikan propaganda melalui proses pembentukan persepsi (shaping perceptions), memengaruhi cara berpikir (manipulating cognitions), dan mengarahkan kecenderungan sikap (directing behavior) audiens terhadap isu pembangunan di Papua Selatan. Film membangun persepsi masyarakat adat sebagai kelompok yang terdampak

langsung oleh proyek pembangunan, sementara negara dan korporasi direpresentasikan sebagai aktor yang memiliki posisi dominan dalam menentukan arah pemanfaatan wilayah.

Melalui penggunaan simbol-simbol seperti hutan adat, sagu, tanah ulayat, dan visual kerusakan lingkungan, film membentuk pemaknaan bahwa pembangunan tidak hanya berkaitan dengan kemajuan ekonomi, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial, budaya, dan ekologis bagi masyarakat lokal. Selain itu, dominasi kesaksian masyarakat adat, dokumentasi lapangan, dan penyusunan narasi yang berpusat pada pengalaman kelompok terdampak mendorong audiens untuk mengembangkan empati, kesadaran kritis, serta perhatian yang lebih besar terhadap perlindungan hak-hak masyarakat adat. Dengan demikian, film Pesta Babi tidak hanya berfungsi sebagai media dokumentasi dan penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen komunikasi politik yang secara sistematis membangun pemaknaan publik mengenai relasi antara pembangunan, kekuasaan, lingkungan, dan masyarakat adat di Papua Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, N. H., & Zalpa, Y. (2019). *Film dan Propaganda Politik (Studi atas Film "G-30S/PKI" dan "Jagal")*. 19(2), 70–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/tama.ddun.v19i2.4470>

Greenpeace. (2026). *Stop PSN Penghancur Hutan: Masyarakat Adat Malind Gugat Izin Proyek Pembangunan Jalan 135 km di Merauke*. <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/65827/stop-psn-penghancur-hutan-masyarakat-adat-malind-gugat-izin-proyek-pembangunan-jalan-135-km-di-merauke/>

Insight, B. (2026). *Dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita Resmi Tayang Gratis di YouTube*. <https://www.babelinsight.id/dokumenter->

pesta-babi-tayang-gratis-youtube

Jowett, G. S., & Victoria, O. (2018). *Propaganda & Persuasion* (Sixth Edit). SAGE Publications Ltd.

JubiTV, R. (2026). *Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita*.
<https://youtu.be/MpdrWgDRVf8?si=-eHaT9nKkNerWliK>

Karnajaya, J. A. (2023). *Analisa Naratif Propaganda Film Dokumenter Sexy Killers*. 444–462.

KBBI. (2026). *Hutan*. Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa.
<https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/hutan>

Lasswell, H. D. (1927). *Propaganda Technique in the World War*.

Mahmudi, M. A. (2013). *Propaganda Dalam Film (Analisis Teknik Propaganda Anti-Iran dalam Film Argo)*. 83–96.

Nurhidayah, D. (2017). *Representasi Makna Pesan Sosial dalam Film Bulan Terbelah di Langit Amerika*. 4(1), 139–152.

Ralph, D. C. (1944). *GI Roundtable 2: What Is Propaganda?*
<https://www.historians.org/resource/gi-roundtable-2-what-is-propaganda-1944/>

Suryanto, H., & Mariani, A. (2018). *Film Sebagai Aset Diplomasi Budaya*. *Jurnal Seni Media Rekam*, 9(2), 47–55.

Susilawati, A., & Marsaulina, V. (2020). *Film dan Reperesentasi Kepentingan Politik: Kasus Pemutaran Film “A Man Called Ahok” dan “Hanum & Rangga” Menjelang Pemilu 2019*.